



# Pengelolaan Aset dan Penganggaran Kesalahan Selalu Jadi Temuan BPK

## Pj Bupati Sampaikan Pidato di Rapat Paripurna DPRD Landak

**LANDAK, SP** - Walau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Landak Tahun Anggaran (TA) 2022 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kali. Namun, pengelolaan aset dan kesalahan penganggaran selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) setiap tahun.

Hal itu diungkapkan Penjabat (Pj) Bupati Landak, Samuel SE MSi ketika menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Landak TA 2022 dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang III Tahun 2023 DPRD Kabupaten Landak di Ruang Sidang Utama DPRD Landak, Senin (5/6).

Samuel menuturkan permasalahan yang selalu muncul setiap tahunnya dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah sampai dengan penyusunan LKPD Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022 adalah terkait pengelolaan aset dan kesalahan penganggaran selalu menjadi temuan BPK.

“Untuk mengatasinya perlu upaya yang konkret serta strategi yang tepat. Berdasarkan hasil temuan BPK serta data yang ada, bahwa kondisi aset yang kita sajikan belum benar-benar terinci, akurat, valid serta up to date,” ucapnya.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Landak, Heri Saman dan dihadiri para Wakil Ketua DPRD Landak, Anggota DPRD Landak, Staf Ahli Bupati Landak, para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, dan tamu undangan lainnya, lebih jauh Pj Bupati Landak menyampaikan bahwa LKPD Pemerintah Kabupaten Landak sudah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

“Laporan keuangan tersebut juga sudah diaudit oleh BPK-RI, dan berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 23.A/LHP/XIX.PNK/5/2023 tertanggal 9 Mei 2023 perihal Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022, menyatakan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Landak TA 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan opini WTP yang ke-10 kalinya secara berturut-turut diraih oleh Pemerintah Kabupaten Landak sejak tahun 2013 lalu,” papar Samuel.

Samuel juga mengingatkan kepada semua SKPD serta semua yang turut ambil bagian dalam proses penyusunan laporan keuangan, agar tidak terlena dan cepat puas dengan apa yang telah kita raih. Sebaliknya, semua ini dapat dijadikan sebagai pemicu dan motivasi bagi kita untuk berbuat lebih baik lagi.

“Dengan meraih opini WTP, bukan berarti LKPD yang telah kita sajikan tanpa kekurangan dan kelemahan.

Namun sebaliknya, masih terdapat beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti. Berkenaan dengan hal tersebut, saya instruksikan kepada semua pimpinan OPD, untuk segera mendaklanjuti hasil temuan yang dimaksud, melakukan percepatan penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada tahun-tahun berikutnya, dan melakukan upaya yang nyata, sehingga kita bisa mempertahankan kualitas laporan dan meraih Opini WTP dari BPK-RI,” tegas Samuel.

Terkait dengan hasil audit oleh BPK, Samuel menyampaikan akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan catatan-catatan, akurakun, dan kelengkapan data-data yang diminta oleh BPK paling lambat 60 hari setelah laporan keuangan disampaikan oleh BPK.

“Ini menjadi perhatian yang khusus, saya sudah sampaikan kepada OPD, sehingga sebelum 60 hari semua temuan tersebut penyelesaiannya sudah dilakukan,” jelas Samuel.

Pj Bupati Landak meminta agar Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Landak TA 2022 dapat segera dibahas. Selanjutnya disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Landak, sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang berlaku.

“Perlu diketahui bersama bahwa batas waktu penyampaian Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 kepada pemerintah pusat paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2023,” tutup Samuel. (rls)